

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi Gugus Kendali Mutu telah menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam beberapa tahun. Banyak penelitian tentang pengembangan instrumen untuk mencapai hasil yang baik. Namun, penerapan Gugus Kendali Mutu berbeda ketika implementasi diterapkan pada organisasi yang berbeda.

April 1962 di Jepang, Kaoru Ishikawa telah menerima komentar positif untuk menerapkan Gugus Mutu di bidang produktivitas, keselamatan, pengiriman, kualitas, dan moral karyawan. Namun, ini memberikan fakta bahwa tidak ada organisasi yang sempurna dan entah bagaimana perbaikan harus dilakukan di suatu tempat dengan semua orang saling membantu. Dengan banyaknya ketakutan yang dihadapi oleh manajemen puncak yang biasanya berbasis strategi, masalah operasi bagi mereka menjadi kurang diperhatikan.

Kualitas, produktivitas, dan biaya operasi relatif tergantung satu sama lain. Kunci dari manajemen kualitas adalah kepuasan pelanggan dengan pengiriman produk tanpa cacat dengan anggaran lebih rendah. Jadi, itulah poin penerapan Gugus Kendali Mutu. Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai alat strategis untuk meningkatkan proses produksi melalui penambahan nilai dan menghilangkan limbah, menggunakan bersama-sama model kualitas tradisional, untuk mendapatkan perubahan budaya, di mana setiap kolaborator menjadi perwakilan pelanggan akhir, menghilangkan limbah melalui proyek GKM (Nemer dan Viera, 2018).

Filosofi utama GKM adalah peningkatan berkelanjutan dalam proses melalui kemajuan sistem organisasi dan penguatan dan pemberdayaan karyawan, dan sebagian besar kegiatan Gugus Kendali Mutu ini difokuskan pada peningkatan

kualitas, peningkatan pengembalian, pengurangan biaya dan penciptaan fasilitas (Hoorzad *et al.*, 2018). Dalam tujuan penerapan dari Gugus Mutu yaitu pengurangan biaya, memotivasi karyawan, mendorong kerja tim, Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, meningkatkan komunikasi dalam organisasi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, menciptakan lingkungan yang bahagia dan bermakna, mengembangkan lingkungan yang positif sikap dan rasa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan organisasi, memuaskan kebutuhan manusia (Gaikwad dan Gaikwad, 2010).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biasanya adalah perusahaan kecil dan menengah yang masih menemukan kesalahan dalam implementasinya sehingga hasil yang diimplementasikan masih sangatlah kurang. Oleh karena itu, perusahaan Indonesia masih mengalami kesulitan atau kegagalan dalam menerapkan GKM. Bagaimanapun, Kualitas sangat penting dalam lingkungan kompetitif saat ini. Peningkatan kualitas adalah proses berkelanjutan yang mengasumsikan penerapan kontrol kualitas.

Pada dasarnya, UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat pada tahun 2017 kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat. Kontribusi PDB dari 1,7 persen meningkat menjadi 4,48 persen, rasio kewirausahaan dari 1,65 persen menjadi 3,1 persen. Ditambahkan pula, hasil capaian tersebut berkat program reformasi total koperasi. Data dari Kemenkop UMKM hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 95,56 triliun telah disalurkan ke 4.408.925 debitur melalui 36 lembaga keuangan penyalur KUR. Penyaluran tersebut mencapai 89,6 persen dari target sebesar Rp 106 triliun. Pernyataan tersebut harusnya menjadi perhatian terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapat porsi yang lebih. Banyak ditemukan pengelolaan UMKM yang masih belum tersistem

dengan baik. Sangat menjadi acuan bahwasannya harus menerapkan *Continuous Improvement*, dengan harapan proses perbaikannya akan menjadi lebih baik.

Pergerakan dalam perkembangan UMKM, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan ekspor pada 2018 juga terjadi di berbagai sektor. Diantaranya, sektor barang jasa yang hanya tumbuh 6,48 persen, melambat dibandingkan 2017 sebesar 8,91 persen (www.bps.go.id). Tak hanya itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria Simanungkalit menuturkan, penurunan ekspor ini terjadi akibat ketidakpastian ekonomi global yang membuat permintaan produk dari negara-negara tujuan ekspor berkurang.

Hal serupa juga terjadi pada industri pengolahan, di mana sepanjang 2018 tercatat melambat menjadi 4,27 persen, dari tahun sebelumnya sebesar 4,29 persen. Sementara, pertumbuhan industri makanan dan minuman juga melambat menjadi 7,91 persen, dari sebelumnya di 2017 sebesar 9,23 persen. Dengan kata lain, selisih nilai ekspor dan impor (net ekspor) 2018 juga menunjukkan defisit 0,99 persen. Adapun pada 2016 net ekspor surplus 0,13 persen dan 2017 surplus 0,31 persen.

Ditambah lagi, Madyaratry *et al.* (2018) menyebutkan bahwa Usaha kecil menengah (UKM) umumnya memiliki kendala dalam efisiensi kinerja dan produktivitasnya. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan UMKM untuk bersaing di pasar global. Oleh karena itu, pemetaan kondisi UKM perlu dianalisis dan didapatkan hasil bahwa Status keberlanjutan UMKM pada setiap dimensi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kategori buruk untuk dimensi teknologi dan kategori baik baik untuk dimensi ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hasil pemetaan indeks keberlanjutan UKM menghasilkan beberapa strategi perbaikan bagi UKM.

Dari pernyataan dari Madyaratry *et al.* (2018) dapat ditekankan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara spesifik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung khususnya meningkatkan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga dapat bersaing secara global baik dari segi kinerja dan penggunaan teknologi. Mengingat begitu vitalnya peranan Dinas Koperasi dan

UKM Lampung dalam memajukan UMKM, tentunya dibutuhkan program-program maupun terobosan yang dilakukan oleh dinas terkait dengan memajukan UMKM khususnya di Provinsi Lampung.

Pada Table 1.1 dibawah ini dapat dilihat bahwa data UMKM di wilayah Provinsi Lampung meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Tabel tersebut menunjukkan jumlah UMKM yang ada di tiap-tiap Kabupaten di Provinsi Lampung.

Tabel 1.1. Data UMKM Kota Lampung Per-Kabupaten 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Presentase (%)
1.	Lampung Barat	24.266	3,15
2.	Tanggamus	50.012	6,49
3.	Lampung Selatan	81.981	10,64
4.	Lampung Timur	110.709	14,37
5.	Lampung Tengah	114.403	14,85
6.	Lampung Utara	54.102	7,02
7.	Way Kanan	35.454	4,60
8.	Tulang Bawang	33.529	4,35
9.	Pesawaran	40.686	5,28
10.	Pringsewu	39.715	5,15
11.	Mesuji	16.417	2,13
12.	Tulang Bawang Barat	20.836	2,70
13.	Pesisir Barat	10.575	1,37
14.	Bandar Lampung	114.809	14,90
15.	Metro	23.138	3,00

(Sumber: DISKOPERINDAG Provinsi Lampung 2017)

Dalam pengklasifikasian UMKM, Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah, Klasifikasi UMKM bisa dibedakan berdasarkan jumlah aset dan total omset penjualan dengan penjelasan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Klasifikasi UMKM

Kategori	Karyawan	Aset	Omset
Usaha Mikro	< 4 Orang	Hingga 50 juta	300juta
Usaha Kecil	5-19 Orang	50 juta-500 juta	300 juta-2,5 miliar
Usaha Menengah	20-99 Orang	500 juta-1 miliar	2,5 miliar-50 miliar
Usaha Besar	> 100 Orang	> 10 miliar	> 50 miliar

(Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008)

Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam artikel “Kepala Bappenas: UKM Penting untuk Pembangunan Berkelanjutan” mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan lima kebijakan untuk mendorong penguatan pengelolaan UKM dan kewirausahaan. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui promosi kewirausahaan, pelatihan vokasi, dan layanan pengembangan bisnis. Kedua, meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui penggunaan teknologi, standar kualitas dan sertifikasi produk, serta perbaikan promosi, pemasaran, dan fasilitas kerja. Ketiga, meningkatkan akses keuangan melalui provisi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, juga institusi keuangan non bank dan layanan keuangan syariah. Keempat, memperbaiki skala bisnis dengan promosi kerja sama dan pengembangan kluster bisnis. Kelima, memperbaiki iklim bisnis dengan penyederhanaan lisensi dan prosedur bisnis.

Lebih jauh lagi, berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2017, jumlah UMKM per 31 Desember 2017 sebanyak 99.307 unit, secara kuantitas mengalami peningkatan sebesar 4.149 unit. Namun rasio kewirausahaan baru mencapai 1,92 persen dari total penduduk Lampung, masih berada dibawah standar internasional yaitu 2 persen, padahal perdagangan menjadi salah satu penggerak perekonomian di Lampung dengan kontribusi sebesar 11,42 persen. Pemerintah telah memberikan fasilitas kemudahan ekspor bagi UMKM dari KPP Bea Cukai yaitu program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi UKM (KITE UKM) yang baru diterapkan di beberapa daerah, dan akan segera dapat diterapkan juga di Lampung. Program

ini dibuat agar kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan UKM semakin meningkat.

Dari dasar diatas, maka faktor peningkatan yang lebih bagus lagi adalah penggunaan konsep dasar Gugus Kendali Mutu sebagai cara yang dianggap sebagai penyebab persoalan mutu atau produksi yang tidak diketahui oleh para pekerja dan manajemen, dan juga diibaratkan sebagai pekerja pabrik mempunyai pengetahuan yang handal, kreatif, dan dapat dilatih untuk menggunakan kreativitas yang murni dalam pemecahan persoalan pekerjaan.

Untuk itu perlu digaris bawahi bahwa Gugus Kendali Mutu merupakan pendekatan yang membina manusia, bukan pendekatan penggunaan manusia. Namun, dalam menggunakan Gugus Kendali Mutu, mereka masih menemukan kesalahan dalam implementasinya. Hasil yang diimplementasikan masih sangat kurang. Mengenai hasilnya, perusahaan-perusahaan Indonesia masih mengalami kesulitan atau kegagalan dalam menerapkan Gugus Kendali Mutu. Kualitas sangat penting dalam lingkungan yang kompetitif saat ini. Peningkatan kualitas adalah proses berkelanjutan (*Continuous Improvement*) yang mengasumsikan pelaksanaan kualitas kontrol. Tidak hanya perlu mengurangi limbah, tetapi juga untuk mengurangi biaya perbaikan berkelanjutan dan berkelanjutan untuk bertahan hidup dan memenuhi harapan pelanggan dalam lingkungan yang sangat kompetitif.

Implementasi GKM berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja dan kinerja organisasi. Implementasi GKM memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja organisasi. Dalam implementasi Gugus Kendali Mutu, pendidikan dan pelatihan, kesadaran kualitas, team work, partisipasi karyawan, pendalaman pengetahuan, perbaikan berkesinambungan, kesadaran kualitas, kesadaran masalah dan kesadaran perbaikan dan seven tools merupakan konstruk yang sangat penting untuk ditingkatkan supaya kinerja organisasi menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan produktivitas kerja pada UMKM (Aziz, 2018).

Meningkatkan kinerja organisasi, memotivasi & memperkaya kehidupan kerja karyawan adalah sarana meningkatkan kinerja organisasi. Mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, sikap, pendapat, perilaku, fakta, dan informasi lainnya, kita memerlukan kuesioner (Aziz *et al.*, 2018). Terlebih lagi, Gugus Kendali Mutu telah menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam beberapa tahun. Namun, penerapan Gugus Kendali Mutu berbeda ketika penerapan diterapkan pada organisasi yang berbeda yang berarti ada UMKM yang sudah menerapkan GKM dan ada pula UMKM yang belum menerapkan GKM itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dampak dari penggunaan Gugus Kendali Mutu guna membantu menilai dan mencapai hasil yang maksimal. penggunaan Gugus Kendali Mutu dalam penelitian ini juga dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia dalam mengevaluasi Implementasi Gugus Kendali Mutu, Produktivitas Kerja, Kinerja Organisasi dan Pencapaian Gugus Kendali Mutu di perusahaan mereka. Hasil dari penelitian empiris dikembangkan untuk dapat memahami penggunaan Gugus Kendali Mutu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Studi ini juga akan membantu industri manufaktur negara-negara industri baru dalam mengevaluasi proses implementasi Gugus Kendali Mutu mereka dan untuk peningkatan penargetkan barang.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Gugus Kendali Mutu dapat mempengaruhi Kinerja pada UMKM di Lampung?
2. Bagaimanakah Gugus Kendali Mutu dapat mempengaruhi Produktivitas pada UMKM di Lampung?
3. Bagaimanakah Produktivitas Kerja dapat mempengaruhi Kinerja pada UMKM di Lampung?

4. Bagaimanakah hasil dampak Pencapaian Keberhasilan Gugus Kendali Mutu dan Produktivitas Kerja terhadap Kinerja pada UMKM di Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Gugus Kendali Mutu terhadap Kinerja pada UMKM di Lampung?
2. Untuk menganalisis pengaruh Gugus Kendali Mutu terhadap Produktivitas pada UMKM di Lampung?
3. Untuk menganalisis pengaruh Produktivitas Kerja terhadap Kinerja pada UMKM di Lampung?
4. Untuk menganalisis dampak Pencapaian Keberhasilan Gugus Kendali Mutu dan Produktivitas Kerja terhadap Kinerja pada UMKM di Lampung?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari studi melalui Gugus Kendali Mutu dalam penulisan ini ditujukan kepada penulis, praktisi dan pembaca.

1. Penulis

Untuk menerapkan ilmu, teori, dan konsep yang penulis terima selama kuliah di IIB Darmajaya. Lebih jauh lagi, penulisan ini diharapkan dapat memperluas keilmuan dan pengetahuan.

2. Praktisi

Sebagai saran dan tambahan informasi untuk UMKM dan masyarakat di Provinsi Lampung sebagai rujukan demi meningkatkan mutu UMKM di Provinsi Lampung.

3. Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperkaya keilmuan setiap pembaca dalam mempelajari Gugus Kendali Mutu,

Produktivitas Kerja, dan Kinerja Organisasi, serta keberhasilan pencapaian Gugus Kendali Mutu pada UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian tentang “ANALISIS DAMPAK PENERAPAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) DAN PRODUKTIFITAS KERJA TERHADAP KINERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI LAMPUNG”.

BAB II: Landasan Teori bab ini menguraikan mengenai Gugus Kendali Mutu, Produktivitas Kerja, dan Kinerja, serta hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis-jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, operasional variabel, Teknik pengumpulan data, dan analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

BAB IV: Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai “ANALISIS DAMPAK PENERAPAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) DAN PRODUKTIFITAS KERJA TERHADAP KINERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI LAMPUNG”.

BAB V: Kesimpulan

Berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca pada umumnya.